

Evaluasi Kinerja Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Kota Sorong

Mucholis Arief Arakian¹, Karsiman², Saiful Ichwan³

Program Studi Administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang di Dinas Perhubungan Kota Sorong dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang di Dinas Perhubungan Kota Sorong. Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa dilihat dari indikator nresponsivitas, responsibilitas, transparansi dan produktivitas. Responsivitas pengujian kendaraan bermotor masih belum optimal karena kurangnya daya tanggap UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam mengenali kebutuhan wajib uji dan dalam menanganinya. Dari segi responsibilitas dapat dikatakan sudah terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal transparansi, UPTD Pengujian Kendaraan belum mampu melaksanakan kinerja dengan baik, hal ini diketahui dari masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Dari segi Produktivitas juga sudah berjalan optimal, ini bisa dilihat realisasi target retribusi dari tahun melebihi target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja, Pelayanan, Pengujian, Jenis Angkutan Barang

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menyebabkan bertambahnya pula pergerakan orang dan barang pada suatu wilayah. Kondisi yang demikian ini dapat menimbulkan masalah dalam bidang transportasi. Dalam era otonomi daerah saat ini, transportasi memegang peranan penting bagi kelancaran pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan keuntungan bagaia daerah agar sebisa mungkin dapat mendayagunakan kemampuan dan potensi daerahnya untuk kelangsungan pembangunan.

UPTD Pengujian kendaraan bermotor (PKB) Kota sorong secara berkala melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan-kendaraan umum bermotor di kota sorong. Hal ini dilakukan dengan untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan. Dengan tujuan semacam itu, UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) Kota sorong dituntut untuk mampu mewujudkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dapat cermat dan dipertanggung jawabkan.

Keberadaan UPTD Pengujian kendaraan bermotor (PKB) Kota sorong merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan kota sorong untuk mewujudkan pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan secara berkelanjutan yang berbasis kepentingan masyarakat dan lingkungan. UPTD Pengujian kendasraan bermotor (PKB) kota sorong ini merupakan salah satu dinas lembaga indonesia yang mempunyai standar pelayanan prima. Indikatornya semua bentuk uji dan pengukuran kendaraan bermotor telah menggunakan alat digital otomatis.

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor telah dilakukan oleh penguji yang memiliki kualifikasi teknis, karena pada setiap tahunnya UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) kota sorong mengirimkan petugas atau pegawainya untuk mengikuti pendidikan baik tingkat nasional maupun regional khususnya untuk meningkatkan kualifikasi penguji sehingga terbentuk tenaga penguji yang berstandart nasional, terampil dan handal. UPTD pengujian kendaraan bermotor (PKB) kota sorong juga telah membangun sistem yang akuntabel, transparan, efektif dan efesien dengan mekanisme dan komputerisasi yang berstandar internasional, dilengkapi dengan adanya papan informasi yang berisikan persyaratan administrasi, besar biaya administrasi, tata pelaksanaan administrasi, tata pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan uji untuk pengawasan secara langsung.

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui evaluasi kinerja pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang di dinas perhubungan kota sorong. 2) Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang di dinas perhubungan kota sorong. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam evaluasi kinerja pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang di dinas perhubungan kota sorong.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk oengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskripsi. Dalam penelitian kualitatif yang memusatkan pada sajian deskriptif, data yang dikumpulkan terutana berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar frekuensi. Populasi : yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di dinas perhubungan kota sorong yaitu berjumlah 40 orang. Sampel : sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, maka penelitian ini tidak memilih sampling yang bersifat

acak melainkan menggunakan teknik sampling bersifat “purposif” karena dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Tehnik pengumpulan data menggunakan, wawancara dan observasi. Tehnik analisis data dengan menggunakan data primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Di Dinas Perhubungan Kota Sorong

Kinerja organisasi publik sebagai gambaran hasil kerja suatu instansi pemerintah dalam bidang tertentu dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu instansi dalam bidang tersebut. Kinerja organisasi publik sangat penting untuk mengetahui/mengukur tingkat pencapaian hasil suatu instansi publik sehingga dapat diketahui sejauh mana pemerintah telah bekerja untuk masyarakat. Penilaian kinerja organisasi publik merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Matrhen Syama, dkk (2017) dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor motivasi dalam kinerja pegawai yang terdiri dari Insentif, Hubungan Antar Pribadi, Kondisi Kerja dan Sarana Prasarana secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial (sendiri-sendiri) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Kota Sorong.

Pelayanan yang optimal diwujudkan dalam suatu bentuk kinerja organisasi yang mana di dalam kinerja organisasi tersebut memuat indicator-indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilannya. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Perhubungan Kota Sorong. Setelah melakukan penelitian dan sejumlah wawancara pada beberapa narasumber dapat dijelaskan bahwa kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sorong dapat direpresentasikan melalui indicator responsivitas, responsilitas, transparansi dan produktivitas sebagai berikut :

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam mengenai kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Indicator responsivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sorong dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Disamping itu

juga untuk mengetahui kinerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sorong khususnya dalam hal daya tanggap dalam mengenai dan memenuhi kebutuhan pemilik kendaraan wajib uji serta upaya yang dilakukan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sorong dalam memenuhi tuntutan kebutuhan dan kondisi yang ada.

Dalam pelaksanaannya UPTD PKB sebagai unit dinas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara berkala harus mampu menangani berbagai keluhan dan tuntutan dari para wajib uji, mungkin salah satunya dari mekanisme pelayanan pengujian itu sendiri. Penilaian wajib uji terhadap UPTD Pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan Kota Sorong dalam pelayanan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor adalah : “ UPTD PKB dalam pelayanannya cukup bagus, kalo ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan di kendaraan, misalnya lampunya tidak nyala terang gitu, langsung disuru untuk mengganti, ini bagus buat keselamatan pengemudi”.

Sementara itu wajib uji lainnya menyampaikan bahwa pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sorong masih mengalami kekurangan, seperti yang di sampaikan oleh seorang pegawai perhubungan bagian kir sebagai berikut : “uji kir disini standarnya ketat mas, jadi bagus tapi sayang waktunya terlalu lama, padahal semuanya ingin cepat kan kita juga kerja menggunakan kendaraan” (wawancara dengan Narasumber, 05 Oktober 2015).

Sedangkan untuk lamanya waktu untuk pengujian telah diatur dalam peraturan tentang pelayanan pengujian kendaraan bermotor kota sorong dijelaskan bahwa setiap kendaraan membutuhkan waktu uji selama 80 menit. Khusus untuk lamanya waktu pengujian ini, salah seorang petugas kir menjelaskan bahwa untuk kendaraan yang baru pertama kali uji dengan kendaraan yang sudah pernah diujikan membutuhkan waktu pelayanan yang berbeda. “kendaraan yang baru pertama uji disini butuh waktu yang lebih lama dari pada kendaraan yang udah pernah diujikan disini, soalnya untuk kendaraan yang baru pertama uji itu harus disalin database kendaraan terlebih dahulu, sehingga kadang membutuhkan waktu yang cukup lama”. Bahwa lamanya waktu pengujian juga dipengaruhi oleh tingkat kerusakan yang terdapat dalam onderdil kendaraan yang diujikan, terbatasnya alat dan pegawai pengujian kendaraan. Waktu lama pengujian juga karena tergantung kerusakan kendaraan, kalau rusaknya masih bisa diperbaiki dan langsung langsung diperbaiki ditempat uji jadikan itu butuh waktu lagi. Apabila peralatan buat uji juga terbatas dan juga penguji-pengujiannya, tenaga SDM disini memang kurang. Dalam mengatasi lamanya waktu pengujian, UPTD memberikan toleransi kepada

kendaraan yang tingkat kerusakan tidak parah. Tetapi bila waktu pengujian setelah itu masih ditemukan kerusakan pada tempat yang sama ya harus diperbaiki ditempat uji atau bisa dinyatakan belumlulus uji. Berarti dia tidak melakukan perbaikan terlebih dahulu dan diperingatkan.

Dalam pembahasan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada wajib uji, responsivitas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sorong masih berjalan kurang optimal. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi tetapi tidak ada akses pengaduan, penyampaian keluhan yang diberikan pihak UPTD kepada pengguna jasa atau wajib uji. Hal ini menyebabkan perhatian dan daya tanggap terhadap tuntutan masyarakat pengguna jasa tidak berjalan dengan baik, disamping itu penyampaian informasi yang menyeluruh juga harus lebih ditingkatkan.

Responsibilitas

Responsibilitas menunjukkan kesesuaian antara pelaksana pengujian kendaraan bermotor oleh UPTD Pengujian kendaraan bermotor kota sorong dengan prosedur/peraturan hukum yang berlaku. Responsibilitas digunakan untuk menjelaskan apakah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh UPTD pengujian kendaraan bermotor kota sorong telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar baik secara eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Indikator responsibilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diselenggarakan sesuai peraturan yang ada dan sejauh mana pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor oleh UPTD Pengujian kendaraan bermotor kota sorong sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya. Responsibilitas diharapkan dapat diwujudkan dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor oleh UPTD pengujian kendaraan bermotor kota sorong berupa penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan, penggunaan kewenangan yang bertanggung jawab dengan tanpa meninggalkan responsivitas terhadap publiknya. Menurut standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD kota sorong, mekanisme uji kendaraan bermotor diawali dari didaftarkan kendaraan wajib uji pada loket pendaftaran dengan melengkapi persyaratan seperti STNK, Buku Uji kendaraan (untuk kendaraan lama/ yang pernah diujikan), surat persetujuan Ijin Trayek, surat keterangan perubahan bentuk kendaraan (untuk kendaraan dengan bak/koroseri baru), ijin usaha (bagi kendaraan angkutan umum), dari pemaparan uraian

diatas mekanisme pengujian kendaraan bermotor yang diungkapkan oleh pegawai bagian kir adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik kendaraan datang di UPTD pengujian kendaraan bermotor mendaftarkan kendaraan pada loket pendaftaran.
- b. Untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor diperlukan beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi, yaitu : a) STNK, b) Buku Uji Kendaraan (untuk kendaraan lama/yang pernah diujikan). c) Surat persetujuan ujin treyek (untuk AKDP). d) Surat keterangan perubahan bentuk kendaraan (untuk kendaraan dengan bak/keroseri baru). e) Ijin usaha (bagi kendaraan angkutan umum). f) Surat keterangan Retribusi Daerah (SKRD). g) Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan bermotor. h) Ijin trayek (bagi kendaraan angkutan penumpang umum).
- c. Melakukan pembayaran retribusi setelah syarat-syarat administrasi lengkap.
- d. Melakukan pemeriksaan awal (pra uji).
- e. Bila kendaraan dinyatakan lulus pra uji kendaraan masuk ke gedung pengujian sedangkan bila kendaraan tidak dinyatakan lulus pra uji maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu.
- f. Dari hasil pemeriksaan teknis dalam gedung pengujian disalin dalam kartu induk dan buku uji selanjutnya disahkan oleh kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Proses percetakan stiker tanda samping kendaraan bermotor dan pengetokan plat uji serta pemasangannya oleh petugas.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam menyelenggarakan proses pelayanan publik dengan menginformasikan secara terbuka berbagai informasi mengenai pelayanan baik diminta maupun tidak dengan tujuan agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi dapat digunakan sebagai perwujudan dari akuntabilitas publik yang dilakukan dalam menyelenggarakan tugas pelayanan publik. Ukuran keterbukaan atau transparansi melalui penyampaian informasi dan hal yang berkaitan dengan proses pengujian kendaraan bermotor dengan menginformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat. Informasi yang disampaikan sebagai transparansi penyelenggaraan program berupa penyelenggaraan pelayanan, prosedur dan berbagai persyaratan teknis dan administratif pelayanan serta tarif retribusi. Dalam pelayanan publik informasi mengenai berbagai hal dan

aktivitas harus selalu diinformasikan agar dapat diakses oleh publik. Beberapa wajib uji mengatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan oleh UPTD kepada wajib uji sudah baik.

Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Hasil yang di capai dapat berupa barang ataupun jasa tergantung dari organisasi yang menghasilnya. Ukuran ini menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendapatan retribusi uji kendaraan bermotor pada setiap bulannya UPTD PKB menargetkan 400 kendaraan yang masuk uji, sedangkan melihat realisasinya tidak semua bulan mencapai target, sehingga ini membuat pihak UPTD PKB untuk lebih meningkatkan kinerja maupun melakukan operasi jalanan di bulan berikutnya. Dari pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa produktivitas dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Sorong dalam pengelolaan pendapatan retribusi dari uji kendaraan bermotor sudah optimal, ini dapat dari realisasi perolehan retribusi mengalami pencapaian yang melebihi, hal ini mengindikasikan bahwa realisasi yang telah ditetapkan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dan sekaligus mengalami peningkatan. Selain itu juga karena usaha yang dilakukan oleh UPTD dengan menerapkan strategi operasi gabungan untuk pihak-pihak yang membandel dalam mengujikan kendarannya, dan juga adanya target bulanan yang telah diterapkan sebagai langkah agar target dari perolehan retribusi dapat terealisasi sukses dilakukan walaupun kadang menemui banyak hambatan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Sorong.

Faktor Pendukung Kinerja

Proses pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPTD PKB Kota Sorong tidak terlepas dari adanya faktor pendukung kinerja. Dari hasil wawancara dengan pegawai UPTD PKB Kota Sorong, dalam proses pengujian kendaraan bermotor UPTD PKB memiliki faktor-faktor pendukung kinerja, diantaranya :

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam menghasilkan kinerja yang optimal. Menurut pegawai Teknis Bagian Daya Angkut Barang, di UPTD PKB sarana dan prasarana yang dimiliki telah berstandar internasional sehingga mampu menghasilkan pelayanan yang bermutu. Sarana dan prasarana disini secara kualitas sudah sangat memadai, bahkan sarana dan prasarana yang kami miliki sudah berstandar internasional. Ini yang kemudian membuat pelayanan kita mampu memuaskan masyarakat”.

Beberapa wajib uji pun menyatakan bahwa sarana dan prasarana di UPTD PKB sudah sangat memadai. Berdasarkan data dari UPTD PKB, sarana maupun prasarana yang dimiliki UPTD PKB saat ini adalah :

1. Komputer (5 Unit)
2. AC & LCD (masing-masing 2 buah)
3. Gedung Uji
4. Gedung administrasi
5. Generator set, model Ten-Montana berfungsi sebagai sumber tegangan arus listrik bila listrik PLN padam.
6. Air Compressor, model Ten Solid-Air 1000-15. Berfungsi sebagai penyimpanan angin yang berkekuatan sesuai dengan kapasitas tangki.
7. CO/HC Tester, model Innova 2000 berfungsi untuk memeriksa ambang batas emisi gas buang pada kendaraan bermotor dengan standar maksimum CO = 4,5% dan HC = 1200 ppm.
8. Alat uji kuncup roda depan.
9. Slide slip Tester, model atae-SP 100. Berfungsi untuk memeriksa penyimpanan sikap roda depan dengan standar -5, +5 (5mm/menit).
10. Brakr Tester, model Ten B 99 berfungsi mengukur efisiensi gaya pengereman pada kendaraan dengan standar efisiensi kekuatan rem minimal 50 % dengan catatan penyimpanan roda kanan dengan kiri max 30%/.

Dukungan dari pimpinan

Dukungan dari pimpinan sangat diperlukan pegawai dalam melakukan kinerja masing-masing. Dengan adanya dukungan dari pemimpin diharapkan semangat dan kekompakkan dari pegawai dapat terjaga. Dukungan itu dapat berupa pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi

maupun sekedar kata-kata motivator dari pemimpin, kinerja pegawai sangat dipengaruhi dukungan pemimpin yang baik selalu memberikan dukungan dan motivasi pada pegawainya.

Faktor Penghambat Kinerja

Hambatan yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi tersebut dan faktor faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar organisasi. Hambatan internal antara lain berupa : a) Terbatasnya anggaran dan susah nya perawatan alat uji. Keterbatasan anggaran untuk memberikan pelayanan optimal pada publik menjadi masalah yang sangat penting dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Dalam pengujian kendaraan bermotor UPTD hanya mengandalkan dana dari pemerintah daerah. Dengan anggaran terbatas kita dituntut untuk bisa optimal, itu sangat berat. Untuk melaksanakan mengirim pegawai ke diklat saja kadangkala kewalahan, apalagi untuk perawatan alat uji, semakin tua umur alat uji, biaya perawatan uji kan juga semakin mahal lo mas, padahal anggaran tiap tahunnya hampir sama. Dalam menjalankan pengujian kendaraan bermotor dengan keterbatasan dana tersebut, beliau menyatakan bahwa UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor telah berupaya menjalankan fungsinya. b) Kurangnya sumber daya manusia atau tenaga teknis. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor oleh UPTD PKB Kota Sorong memerlukan sumber daya manusia untuk melaksanakan operasionalisasi program di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada diakui karena dampak dari tidak adanya dana untuk mengelola program sehingga alokasi anggaran untuk sumber daya pun juga tidak ada. Cukupnya sumber daya manusia sangat penting keberadaannya karena setiap bagian dalam organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga kinerja organisasi diharapkan dapat berjalan maksimal. Sedangkan hambatan ekstern antara lain berupa. 1) Kurangnya pemahaman masyarakat. 2) Kurang optimalnya pengujian kendaraan bermotor oleh UPTD PKB kota sorong juga dipengaruhi karena kurangnya pemahaman masyarakat wajib uji. 3) Kurangnya pemahaman masyarakat ini berupa adanya stigma dari masyarakat bahwa pengujian kelayakan bermotor sama halnya menganggap jika sudah membayar pajak kendaraan berarti tidak perlu uji kelayakan kendaraan. Stigma kedua yang berkembang dimasyarakat adalah bahwa setiap pengujian pasti lulus, padahal jika kendaraan tidak memenuhi standar kelayakan dapat dinyatakan ditunda kelulusannya oleh UPTD. e) Kesadaran masyarakat untuk mengujikan kendarannya dalam hal ini kinerja UPTD

PKB dalam proses pengujian kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan maksimal tanpa adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengujikan kendarannya.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Evaluasi Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang di Dinas Perhubungan Kota Sorong

Adapun upaya yang dilakukan dalam evaluasi kinerja pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang di dinas perhubungan kota sorong antara lain sebagai berikut : 1) Pemerintah kota sorong sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah provinsi papua barat memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing dengan daerah lain dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan khususnya mengenai transportasi darat. 2) Dinas perhubungan kota sorong berupaya dapat memeberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terbaik serta memberikan kontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) guna menopang pembiaan pelaksanaan pembangunan yang ada di bidang perhubungan transportasi darat. Pelaksanaan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khusus dalam menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan informasi dan komunikasi kota sorong merupakan langkah preventif. 3) Dinas perhubungan informasi dan komunikasi kota sorong berupaya menempatkan transportasi dan informasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang tidak ditawar-tawar lagi. Dinas perhubungan kota informasi dan komunikasi selalu menciptakan keterbukaan dan kemudahan bidang transportasi serta kemudahan mengakses berbagai informasi melalui media yang ada.

Hasil wawancara penulis dengan petugas pengujian kendaraan bermotor tentang upaya yang di lakukan dalam mengevaluasi kinerja pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang “ialah dengan memberikan pelayanan yang terbaik agar memberikan kepuasan bagi para calin uji kendaraan bermotor serta memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya pengujian kendraan bermotor yang akan mereka gunakan nanti. Hak dan kewajiban untuk memperoleh berbagai jenis pelayanan juga berhak di dapat oleh masyarakat agar dapat mengetahui peraturan-peraturan yang ada”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kota Sorong untuk uji

kelayakan kendaraan bermotor dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Responsivitas UPTD PKB Kota Sorong dalam melaksanakan uji kelayakan kendaraan bermotor masih kurang optimal mengingat banyaknya permasalahan/kasus seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang uji kelayakan kendaraan bermotor, lamanya waktu pengujian yang membuat pekerjaan wajib uji terganggu, padahal kendaraan yang di ujikan merupakan sarana utama dalam bekerja. 2) Responsibilitas dalam kinerja UPTD PKB Kota Sorong dalam melaksanakan uji kelayakan kendaraan bermotor dapat dinyatakan cukup baik dalam menyelenggarakan peranan dan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Transparasi yang diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi dan pengumuman mengenai prosedural, mekanisme dan berbagai persyaratan dalam pengujian kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan kota sorong sudah cukup baik, ini terlihat dari jalinan keterbukaan komunikasi antara pihak dinas engan pihak wajib uji kendaraan bermotor. 4) Produktivitas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Sorong dalam pengelolaan pendapat retribusi dari uji kendaraan bermotor sudah optimal, ini dapat dilihat dari realisasi perolehan tertribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ruky, 2002, Sistem Manajemen Kinerja (Performance Management System, Gramedia, Jakarta.
- Agus Dwiyanto, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi 1983, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosoeparto, Manajemen Strategi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bagong Suyanto & Sutinah, 2007, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan, Edisi Pertama Cetakan ke 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Husein Umar, 2002, Evaluasi Kinerja Perusahaan, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Faustino Cordoso Gomes, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi, Yogyakarta.
- H. B. Sutopo, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, Pusat Penelitian UNS Press, Surakarta.
- Hessel Nogi S Tangkilisan, 2005, Manajemen Publik, Gramedia, Jakarta.

- Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joko Widodo, 2007, Analisis Kebijakan Publik, Banyumedia Publishing, Malang.
- Joko Widodo, 2008, Birokrasi Berbasis Kinerja Banyumedia Publishing, Malang.
- Lexy J. Moeleong, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun, 2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta.
- Ratminto dan Winarsih Atik Septia, 2005, Manajemen Pelayanan, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Syama, M., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). FAKTOR MOTIVASI DALAM KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SORONG. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 12-20.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Riseach and Development, Bandung.
- Surya Dharma, 2005, Manajemen Kinerja (Falsafah, Teori dan Penerapannya), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suyadi Prawirosentono, 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan, BPFE, Yogyakarta.
- Timpe, A. Dale, 1999, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja, Cetakan ke 4, Gramedia, Jakarta.
- William N Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yeremias T. Keban, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Gava Media, Yogyakarta.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi